**BAB III**

**DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

1. **Sejarah Singkat Polres Pagaralam**

Pada 1 Juli 1967, bertepatan dengan hari Bhayangkara ke-21, Menteri Panglima angkatan kepolisian mengeluarkan peraturan No. Pol 5/Prt/Men-Pa ngak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar structural organisasi angkatan kepolisian dari terbentuknya polda-polda maka terbentuklah satuan kewilayahan yaitu komando resort Kota (Koresta) dan Komando Kepolisian Kota Besar (Koabes) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes). Semenjak dikeluarkannya surat keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) atau Kepolisian Resort (polres) yang beralamat di jalan Bhayangkara Gunung Gare Kota Pagaralam, Pagar Wangi, kec. Dempo Utara Kota Pagaralam. Polres juga memiliki 5 satuan wilayah yaitu Polisi Sektor (Polsek).

Setelah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, sekarang polres Pagaralam dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Dwi Hartono, S.I.K., M.H yang mengepalai beberapa bagian dan satuan dengan jumlah Personil Polres 369 Personil, termasuk Personil Perwira yang berada di 5 Polsek Jajaran. Dari ke lima Polsek tersebut 3 diantaranya berstatus sebagai Polsek Rural dan 2 Polsek lainnya masih berstatus Polsek Pra Rural.

51

Menurut bapak Suryadi selaku KasubBag Humas, beliau menceritakan bahwa berdirinya Polres Pagaralam sebagai titk tolak pada masa penjajahan jepang, dengan berdirinya sekolah pendidikan perwira Militer Jepang yang disebut Giyugun di Pagaralam melalui sekolah ini telah banyak melahirkan pemuda-pemuda Indonesia yang akhirnya menjadi tunas-tunas pejuang kemerdekaan Indonesia, yang pada tanggal 20 Agustus 1945 meletakkan momentum bersejarah dengan mengibarkan bendera merah putih di keamatan Pagaralam. Selanjutnya proses demi proses diikuti dengan seksama sampai akhirnya lahirlah Kota Pagaralam sebagai Kota administratif dan pemekaran wilayah kecamatan Pagaralam menjadi 4 wilayah kecamatan yaitu, kecamatan pagaralam Utara, kecamatan Pagaralam Selatan, kecamatan Dempo Utara, dan kecamatan Dempo Selatan. Pada tanggal 21 Juni 2001 DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagaralam dan tanggal 21 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pagaralam dengan dilantiknya Walikota Pertama Drs.H. Djazuli Kuris.

Kemudian pada tanggal 7 Juli 2002 Polsek Pagaralam berubah menjadi Polres (Kepolisian Resort) tingkat Kota. Yang di pimpin oleh Kapolres pertama AKBP Mahindra Inkandar. Secara geografis Polres Pagaralam berada di posisi 4o  Lintang Selatan (LS) dan 103,15o Bujur Timur (BT). Kota pagaralam sendiri memiliki luas wilayah 633,66 M2, yang terbagi menjadi 5 Kecamatan, yang terdiri atas 35 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 157,955 jiwa.

1. **Tugas Pokok Kepolisian**

Rumusan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi penegak hukum dalam rangka menjamin terlaksananya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat. Untuk itu Polres Pagaralam sebagai pengembang fungsi Kepolisian memiliki kewenangan penegakkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:[[1]](#footnote-1)

1. **Tugas Pokok Polri**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayan kepada masyaraka
4. **Tugas Polres Pagaralam**

Polres Pagaralam bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Kota Pagaralam, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

1. **Visi dan Misi**

Pada sebuah organisasi/lembaga/instansi yang bergerak di bidang hukum tentunya memiliki pandangan untuk menentukan tujuan dan arah gerak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya semuanya terangkum dalam visi dan misi Polres sebagai berikut:

1. **Visi**

Polres Pagaralam bertekad mewujudkan polri yang bermoral dan professional, dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat pelaksanaan tugasnya sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang terperaya serta penegak hukum dengan menjnjung tinggi HAM.[[2]](#footnote-2)

1. **Misi**
2. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepda masyarakat secara mudah, tanggap atau responsif serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat demi lancarnya gerak pembangunan daerah diseuruh wilayah Pagaralam.
4. Membimbing masyarakat melalui upaya sambaing masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku.
5. Penegak hukum secara professional, objektif, proporsional, transoaran dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan serta menghormati HAM.
6. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas Polres Kota Pagaralam.
7. Menstimulasi insan Polri yang makin cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugasnya.
8. Mendukung program-program pembangunan Pemerintah Daerah dalam rangka menjadikan Kota Pagaralam Energi dan Lumbung Pangan Nasional.[[3]](#footnote-3)

Dari visi dan misi diatas bisa diperjelas bahwa, Polres bertujuan untuk menjadikan anggota kepolisian yang selalu menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, hukum dan norma-norma yang ada sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bekerja sesuai aturan. Adapun gambarannya, misalnya polanas yang bertugas dilapangan. Mendapati masyarakat yang tidak patuh pada tata tertib lalu lintas, maka sikap polisis harus tegas segera menindak (menilang) masyarakat yang melanggar tersebut, dalam artian tanpa menggunakan kekerasan. Dengan begitu akan teriptalah aparat kepolisian yang adil, dan memiliki moral serta akhlak yang mulia.

1. **Pelaksanaan Fungsi Polres**

Adapun pelaksanaan fungsi Polres ialah sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

1. Pelaksanaan fungsi Intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detetion) dan peringatan dini (early warning)
2. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui kepolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terjalinnya hubungan antara polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.
3. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, yang meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. Pelaksanaan fungsi Shabara, meliputi kegiatan peraturan, penjagaan pengawalan, Patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindasan tindak pidana ringan (Tipiring), pengaman ujuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan VIP.
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboraturium forensikn dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. **Struktur Organisasi Polres Pagaralam**

Struktur Organisasi Polres Pagaralam mengacu pada Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Struktur organisasi merupakan hal penting dalam suatu lembaga atau instansi sebab dengan adanya struktur oeganisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Berikut struktur organisasi Polres Pagaralam.[[5]](#footnote-5)

**Daftar Nama Pejabat Perwira Polres Pagaralam**

**Tabel. 3.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Pangkat** | **Jabatan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Dwi Wartono,S.I.K., M.H | AKBP / 78090885 | Kapolres |
| 2 | Heru Kunahyo, SE | Kompol / 76101109 | Waka Polres |
| 3 | Indarmawan, SH., M.Si | Kompol / 73020174 | Kabag Ops |
| 4 | Halaludin.R | AKP / 61010427 | Kasubag Binops |
| 5 | Suryadi | IPTU / 67090323 | Kasubag Humas |
| 6 | Bayu Witrisno | IPTU / 87101505 | Paur Min Bag Ops |
| 7 | Sunarso, SH | Kompol /66010196 | Kabag Ren |
| 8 | Budi Yusfandi, SH | Kompol / 74070798 | Kabag Sumda |
| 9 | Idham Haris Sugiono, SE | IPTU / 73120819 | Kasat Intelkam |
| 10 | Zaldi Jaya, SH | IPTU / 78080065 | Kbo Sat Intelkam |
| 11 | Deli Daris, SH., MH | AKP / 77090295 | Kasat Reskrim |
| 12 | Hermansyah, S.Ip | IPTU / 79090054 | Kbo Sat Reskrim |
| 13 | Bobby Eltarik, SH | AKP / 77070719 | Kasat Res Narkoba |
| 14 | Apriansyah, SH | IPDA / 81040217 | Kanit Idik I Narkoba |
| 15 | Ramsi, SH | IPDA / 68080156 | Kanit Idik II Narkoba |
| 16 | Martono | AKP / 61060133 | Kasat Binmas |
| 17 | Ida Kade Damiana | AKP / 64120846 | Kasat Lantas |
| 18 | Krisna Hadi Widyanto S.T.K | IPDA / 93091044 | Kbo Sat Lantas |
| 19 | Makmun Arrasyid, SH | AKP / 63040943 | Kasat Sabhara |
| 20 | Radikin | IPDA / 67100142 | Kasiwas |
| 21 | Matsum J | IPDA / 60110426 | Kasium |
| 22 | Ari Oktavianus Ginting | IPDA / 78110294 | Kasi Propam |
| 23 | Mas Suprayitno R, S.Tr.K | IPDA / 93121283 | Ka SPKT |
| 24 | Herry Widodo, SH | AKP / 72080459 | Kapolsek PGA.Utara |
| 25 | Subra B. Nurul | IPTU / 62090323 | Kapolsek PGA.Slatan |
| 26 | Wempi A.Kayadu | IPTU / 65040787 | Kapolsek DP.Utara |
| 27 | Galuh Febri Saputra S.T.K | IPDA / 90020309 | Kapolsek DP. Tengah |
| 28 | Sariyo | IPTU / 63010757 | Kapolsek DP. Selatan |

Sumber data: Arsip Humas Polres Pagaralam

1. **Deskripsi Susunan Organisasi Polres Pagaralam**

berdasarkan Perkap No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, adapun deskripsi tugasnya sebagai berikut:[[6]](#footnote-6)

1. **Unsur pimpinan**
2. Kepala Kepolisian Resort Disingkat Kapolres

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di llingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya. Dalam hal ini Kapolres tetap berkoordinasi kepada Kapolda terkait dengan pelaksanaan tugasnya dan selalu memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda.

1. Wakil Kepala Kepolisian Resort disingkat WaKa Polres

Waka Polres merupakan unsure pimpinan Polres yang berada di bawah dan anggung jawab kepada Kapolres. Waka Polres memiliki tugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres.

1. **Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan**
2. Seksi Pengawasan (siwas)

Siwas merupakan unsure pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggung jawab dibawah Kapolres. Diwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perenanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan tindakan sanksi terhadap penyimpangan yang ditemukan.

1. Seksi Provos dan Paminal (Sipropam)

Sipropam bertugas malaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personil.

1. Seksi keuangan (Sikeu)

Sikeu merupakan unsure pembantu pimpinan yang bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verfikasi, certa pelaporan pertanggung jawaban keuangan dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

1. Seksi Umum (Sium)

Sium merupakan unsure pembantu pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan mengagendakan surat masuk/keluar, mengagendakan rapat pimpinan, menjadi protokoler untuk acara penting terkait dengan Polres.

1. Bagian Operasi (Bag Ops)

Bag Ops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bag Ops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, mengamankan kegiatan masyarakat atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

1. Bagian Prencanaan (Bag Ren)

Bag Ren merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bag Ren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya. Kegiatan Bag Ren antara alin seperti, menyusun laporanrealisasi anggaran (LRA), penyusunan penetapan kinerja meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

1. Bagian Sumber Daya Manusia (Bag Sumda)

Bag Sumda merupakan unsure pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bag Sumda bertugas melaksanakan peminaan administrasi personi, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

1. **Unsur Pelaksana Tugas Pokok**
2. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT merupakan unsure pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

1. Satuan intelijen dan keamanan (Satintelkam)

Sat Intelkam merupakan unsure pelaksana tugas pokok yang yang berda di bawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

1. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboraturium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan.

1. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)

Sat Resnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Sat Resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalagunaan dan peredaran gelap narkobaberikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangkah penegahan dan rehabilitasi korban penyalagunaan Narkoba.

1. Satuan Pembinaan Mayarakat (Sat Binmas)

Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk keamanan, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

1. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)

Sat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya Satsabhara bertanggung jawab kepada Kapolres.

1. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)

Sat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Semua tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ada di Polres Pagaralam serta tetap berkoordinasi kepada Kapolres.

1. Satuan Pengamanan Obyek Vital (Satpamobvit)

Sat Pamobvit merupakan unsur pelaksanatugas pokok yang berada di bawah Kapolres, dan bertugas melaksanakan kegiatan keamanan objek vital (Satpamobvit) yang emliputi proyek/instansi, objek wisata, kawasantertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian. Pengamanan sebagaimanayang dimaksud dilaksanakan oleh Polres yang dalam daerah hukumnya terdapat kantor kementrian, lembaga Negara, dan perwakilan Negara/ lembaga asing.

1. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti serta administrasinya di ligkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Satuan Polisi Air (Satpolair)

Sat Polair bertugas melaksanakan fungsi kepolisisan perairan, yang meliputi patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Dalam mlaksanakan tugasnya Satpolair bertanggung jawab kepada Kapolres.

1. **Unsur Pendukung**

Seksi Teknologi Informasi Kepolisian (Sitipol)

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumulan dan pengolahan data, serta penyajian data, termasuk iformasi criminal dan pelayanan multimedia.

1. **Unsur pelaksana Tugas Kewilayahan Polres**

Adalah kepolisian Negara Repulik Indonesia Sektor (Polsek) 57. Polsek (Kepolisian Sektor) merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kapolres atau bisa dikatakan cabang kepolisian yang berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Masing-masing unsur diatas tersebut berkoordinasi satu sama lain dan memiliki kewenangan tersendiri serta harus bisa mempertanggung jawabkan tugasnya tersebut kepada pimpinan (Kapolres). Agar terwujudnya lingkungan kerja yang efektif dan korelatif.

1. **Deskripsi Bagian Operasi Polres Pagaralam**
2. Bagian Operasi merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
3. Dalam melaksanakan tugas, bagian Oprerasi terbagi lahi menjadi 3 yaitu:
4. Sub Bagian Pembinaan Operasional (Sub Bag Bin Ops)

Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops) bertugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kapolres dan rencana-rencana strategic bidang operasional, dan menyelenggarakan manajemen operasi kepolisian, yang meliputi perencanaan, koordinasi, administrasi, dan pengendalian serta analisis dan evaluasi pelaksanaan operasi kepolisian termasuk tindakan kontinjensi. Kabagbinops dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Perencana Operasi (Kasubbagrenops)
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Operasi (Kasubbagminops)
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Operasi (Kasubbagkermaops)
4. Sub Bagian Pengendalian Operasional (Sub Bag Dal Ops)

Bertugas membina dan menyelenggarakan koordinasi, administrasi dan pengendalian operasional termasuk pengumpulan, pengelolahan dan penyajian data operasional serta pembinaan fasilitas dan perawatan tahanan dan menerima laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian oleh masyarakat.

1. Sub Bagian Humas (Sub Bag Humas)

Humas Polri adalah jembatan penting. posisinya menghubungkan media dengan polisi. Keberadaan humas adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat melalui media massa. Dalam rangka memberikan pelayanan public, Kepolisian Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standard/ prosedur pengolahan guna menjamin pelayanan informasi public yang ransparan dan akuntabel.

Bagian humas adalah merupakan unsur pelaksanaan staf khusus yang bertugas menyelenggarakan fungsi kehumasan. Dilakukan melalui penyampaian berita atau informasi serta kerja sama dengan media massa dalam tangka pembekalan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polres Bagian humas bertugas melakanakan penerangan satuan (Penset) dalam rangka untuk pemetaan informasi di lingkungan Polres, melaksanakan peliputan, monitoring produksi da pembuatan dokumentasi semua pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan kebijakan pompinan Polres. Bagian humas dengan fungsi penyelenggaraan penerangan yang meliputi pengelolahan dan penyampaian informasi, termasuk kerja sama atau kemitraan dengan media massa berikut komponennya dan juga memberikan infirmasi kepada masyarakat tentang hukum atau peraturan yang berlaku atau kejadian gangguan kamtibnas yang terjadi di wilayah masing-masing.

Tugas pokok Humas Polres sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap kegiatan humas yang dilaksanakan di lingkungan Polres
2. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolahan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa
3. Pengumpulan dan pengelolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita di lingkungan Polres
4. Peliputan, pemantauan, produksi dan dokumentasi yang berkaitan dengan tugas di lingkunga Polres
5. Perencanaan dan pengadministrasian umum,di lingkungan humas Polres
6. Menyelenggarakan peliputan, pemantauan dan evaluasi kegiatan program humas Polres

Menjadi pengampu fungsi kehumasan di lingkungan Polres tidaklah ringan. Jadi perlu dibutuhkan personil personil yang mempunyai wawasan luas dan skil mumpuni, selainpaham bidang kehumasan personil harus paham ilmu reserse, lantas, intel, sabhara, binmas, narkoba dll. Selain itu personil humas harus paham teknologi informatika (TI), medsos, blog, website, fotografi, video, design grafis, melunis berita dll. Agar produk yang di hasilkan satuan bisa sampai ke msayarakat dan menjadi berita yang positif yang nedingnya akan meningkatkan kredibilitas Polres di mata masyarakat.

Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum. Memelihara Kamtibnas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling berkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Sub Bagian Huubungan masyarakat atau yang bisa disebut Sub Bag Humas. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian. Kata hubungan masyarakat berasal dari bahasa Indonesia yang biasa di singkat Humas. Secara khusus yang berkaitan dengan informasi dari luar atau memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam dasar Humas, dapat kita bedakan yaitu sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai organisasi dan sebagai kegiatan. Humas merupakan bagian integral dari fungsi organic Polri yang menyelenggarakan kegiatan memantau, produksi dengan baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam mnegeri. Fungsi humas merupakan sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan informasi, pengembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtinmas.

Intelijen kepolisian atau police intelligence menakup ‘criminal intelligence’ yang merupakan bagian integral dari fungsi utama Polri, yaitu represif, prevensif dan pembinaan masyarakat (yang akhir ini sering di sebut pre-emptif). Police intelligence dan criminal intelligence mencakup semua kriminalitas dari yang konversional crime sampai yang canggih, seperti terorisme, human trafficking, weapon trafficking, drug trafficking, money laundering, corruption, cyber crime dan lain-lain.

Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam dan SuBagHumas di lingkungan Polri diatur berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Th. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Th. 2010 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Pada tingkat polda terdapat Direktorat Humas (Dihumas) sebagai unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Humas, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka penceghan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri. Pada tingkat Polres terdapat Sub Bagian Humas (Sub Bag Humas) yang bertugas menyelenggarakan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait di bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum. menerima pemberitauan kegiatan masyarakat atau kgiatan politik, serta membuat rekomendasi. Pada tingkat Polsek terdapat Unit Humas, bertugas menyelenggarakan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan Kamtibnas, serta pelayanan perizinan.[[7]](#footnote-7)

1. **Profil Singkat Kota Pagaralam**
   1. **Geografis dan Administratif**
2. **Geografis**

Kota pagaralam merupakan bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 0 Tahun 2001 Lembaran Negara Nomor 4115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347 dan peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tangga 17 Oktoter 2001.

Secara geografis Kota Pagaralam berada pada posisi 4o Lintang Selatan (LS) dan 103,15o Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 53.366 Ha (633.66 Km2) dan terletak sekitar 298 Km dari Palembang serta berjarak 60 Km disebelah barat daya dari ibukota kabupaten Lahat. Kota Pagaralam merupakan daerah yang berbukit dengan ketinggian 400-3400 di atas permukaan laut (dpl). Kondisi topografi bervariasi dari 0 sampai 15 derajat, sampai kelerengan 45 derajat.[[8]](#footnote-8)

1. **Administratif**

Secara Administratif, wilayah ini terbagi atas 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pagaralam Selatan, Pagaralam Utara, Dempo Selatan, Dempo Tengah, dan Dempo Utara. Serta terdiri dari 35 Kelurahan dan 84 Dusun. Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kota Pagaralam mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara :berbatasan dengan kecamatan jarai, kabupaten Lahat.

Sebelah Timur :berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Sebelah Selatan :berbatasan dengan kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat.

Sebelah Barat :berbatasan dengan kecamatan T Sakti, Kabupaten Lahat

Table 3.2

Pembagian Kecamatan Dirinci per Kelurahan da Kota Pagaralam

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Luas Wilayah | | |
| Administrasi | | |
| (Km) | (Ha) | (%) Thd Total |
| 1 | Kecamatan Dempo Selatan | 5 | 217,95 | 21.795 | 34,40 |
| 2 | Kecamatan Dempo Tengah | 5 | 173,09 | 17.309 | 27,32 |
| 3 | Kecamatan Dempo Utara | 7 | 63,17 | 12.398 | 19,56 |
| 4 | Kecamatan Pagaralam Selatan | 8 | 55,47 | 6.317 | 9,97 |
| 5 | Kecamatan Pagaralam Utara | 10 | 55,47 | 5.547 | 8,75 |
|  | **Total** | 35 | 633,66 | 63,366 | 100 |

Sumber Data: Arsip Humas Polres Pagaralam, 2017

* 1. **Demografi**

1. **Jumlah Kepadatan Penduduk**

Penduduk merupakan unsur yang menentukan dalam rencana pengembangan wilayah karena akan menentukan jenis fasilitas yang ada baik itu kesehatan, pendidikan dan lain-lain, datang dan yang menjadi faktor pengurang atau yang menjadi faktor menyebabkan penurunan yaitu kematian dan pindah. Pada tahun 2011 jumlah penduduk yang ada di Kota Pagaralam sebanyak 127.706 jiwa, terdiri dari 65.614 jiwa laki-laki dan 62.092 jiwa perempuan dengan angka sex ratio sebesar 105,67%. Tingkat kepadatan penduduk sebesar 201,54 jiwa/Km2.[[9]](#footnote-9)

1. **Pertumbuhan penduduk Kota Pagaralam**

Pertumbuhan penduduk Kota Pagaralam berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Rata-rata perumbuhan penduduk Kota Pagaralam pertahun sebesar 1,408%. Berikut persentase bertambahnya penduduk pertahun berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam memprediksikan jumlah penduduk di Kota Pagaralam menggunakan rumus geometri proyeksi penduduk sebagai berikut[[10]](#footnote-10):

Rumus proyeksi:

Keterangan:

Pt = jumlah penduduk tahun dicari

Po = jumlah penduduk tahun awal

r = laju pertumbuhan

n = jumlah tahun proyeksi

dari rumus di atas maka dapat dihitung proyeksi penduduk Kota Pagaralam 5 tahun kedepan.

* 1. **Keuangan dan perekonomian daerah**

1. Keuangan daerah

Dalam era otonomi deaerah, setiap kabupate/kota diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menggali Pedapatan Asli Daerah (PAD). Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasionalyang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelolah kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan peratura tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi. Dari data yang ada meneybutkan bahwa realisasi pendapatan Asli Daerah untuk Kota Pagaralam tahun 2016 mencapai Rp. 665.156.768.534,- dari target Rp. 668.859.389.611,- sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari dana Al okasi Umum. Penerimaan dari pajak mencapai Rp. 6.231.360.623,- dari target Rp. 2.804.084.110,- sedangkan penerimaan sektor restribusi dari Rp. 9.769.137.101,- yang di targetkan mencapai Rp. 11.274.241.954,-. 85 peren dari penerimaan retribusi terseut berasal dari pelayanan kesehatan.[[11]](#footnote-11)

1. Data Perekonomian Kota Pagaralam

Struktur ekonomi menggambarkan kontribusi atau peranan masing-masing sektor dalam pembentukan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dalam konteks lebih jauh akan memperlihatkan bagaimana suatu perekonomian mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di berbagai sektor. Data dan informasi mengenai perekonomian daerah merupakan faktor penting agar tercapainya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi. Informasi dan data mengenai fotret perekonomian makro daerah biasanya disajikan dalam bentuk statistic pendapatan regional yang biasa disebut Produk Regional Domestik Bruto (PDRB).

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah dan mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah/region. Data PDRB menggambarkan kemampuan/potensi suatu daerah dalammengelolah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sanat tergantung pada faktor-faktor tersebut. Adanya berbagai keterbatasan menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Dari sini dapat dilihat besaran nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi. Selain itu dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah.[[12]](#footnote-12)

PDRB Kota Pagaralam baik pada harga berlaku maupun harga konstan, dikarenakan berubahnya tahun dasar dari 1993 menjadi 2000. Sejak tahun 2004 mengalami perubahan yang cukup besar dari publikasi-publikasi Sejak tahun 2004 mengalami perubahan yang cukup besar dari publikasi-publikasi sebelumnya. PDRB Kota Pagaralam tahun 2016 atas dasar harga berlaku mencapai 3.536,124 miliar rupiah atau naik sekitar 12,89 persen dari 3.271,216 miliar rupiah PRDB tahun 2015. Peningkatan PDRB ini sebagian besar di sumbang oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, pertanian, dan bangunan.

* 1. **Sosial budaya**

1. **Pendidikan**

Pendidikan merupakan sarana mutlak dalam menngkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu tinggi. Sumber Daya Manusian yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan harus di lengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencapai tujuannya dengan baik. Sampai dengan tahun 2016 jumlah sarana pendidikan negeri dan swasta yang ada di Kota Pagaralam terdiri dari 25 buah TK, 91 buah SD/MI, 23 buah SMP/MTS, dan 17 SMA/SMK/MA dengan tenaga pengajar sebanyak 797 orang untuk tingkat SMA/SMK, 973 tingkat SD, DAN 765 tingkat SMP/MTS. Guru-guru tersebut mengajar di tingkat pendidikan masing-masing dengan jumlah murid untuk masing-masing tingkat pendidikan 8.243 untuk SMP/MTS, 7,623 SMA/SMK/MA dan 17.517 orang untuk tingkat SD/MI.[[13]](#footnote-13)

Dalam rangka meningkatkan pertisipasi masyarakat Kota Pagaralam untuk bersekolah pemerintah Kota Pagaralam telah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang pendidikan. Adapun kebijakan tersebut adalah memberikan subsidi biaya pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Sementara itu, berikut ini adalah data tentang perkembangan sekolah di bawah Diknas Kota Pagaralam pada table dibawah ini.

Table 3.3

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten/Kota

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Kecamatan | Jumlah Sarana Pendidikan | | | | | | |
| Umum | | | | Agama | | |
| SD | SMP | SMA | SMK | MI | MTS | MA |
| Dempo Selatan | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dempo Tengah | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dempo Utara | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pagaralam Selatan | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Pagaralam Utara | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |

Sumber Data: Humas Pemerintah Kota Pagaralam, 2017

Perkembangan jumlah sekolah dasar, SMP dan SMA dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 cendrung fluktuatif, tetapi dilihat dari kondisi baik, termasuk sarana dan prasarana didalamnya. Selain saran dan prasarana, untuk mendukng terciptanya pendidikan yang berkualitas diperlukan juga tenaga pengajar yang berkompeten.

1. **Kemiskinan**

Penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada tahun 2016 adalah sebesar 213.574. ini berarti jika pengeluaran rata-rata perkapita perbulan kurang dari 213.574 maka tergolong penduduk miskin persentase penduduk miskinpada tahun 2010 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2015. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin adalah 9.81 persen jika dilihat dari persentase penduduk miskin tersebut pemerintah Kota Pagaralam agar dapat lebih memperluas lapangan kerja sehingga bisa meningkatkan pendapatan penduduk. Selainitu lebih meningkatkan produktivitas dari lapangan usaha yang telaha ada seperti di bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian mayoritas penduduk Pagaralam.[[14]](#footnote-14)

Table 3.

Jumlah Penduduk Miskin Per kecmatan

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Kecamatan | Jumlah keluarga miskin (KK) |
| Dempo Selatan | 1.370 |
| Dempo Tengah | 1.413 |
| Dempo Utara | 1.876 |
| Pagaralam Selatan | 2.251 |
| Pagaralam Utara | 2.895 |

Sumber Data: Humas Polres Kota Pagaralam, 2017

1. **Jumlah rumah**

Berdasarkan data hasil monitoring keseluruh kecamatan Kota Pagaralam diketahui bahwa dari rumah sejumlah 30.107 telah diperiksa sebanyak 10.000 rumah (35,1%) ada 6.588 rumah yang memenuhi standard sebagai rumah sehat atau sekitar 62,0% pada tingkat Kota Pagaralam tahun 2016. Pada tahun 2016 mengalami peningkata rumah yang diperiksa sejumlah 19.3561 rumah, 10.293 rumah sehat atau sebesar (50,37%).

Tabel 3.

Jumlah rumah per kecamatan

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Kecamatan | Jumlah Rumah |
| Dempo Selatan | 4183 |
| Dempo Tengah | 4727 |
| Dempo Utara | 6310 |
| Pagaralam Selatan | 11388 |
| Pagaralam Utara | 9863 |

Sumber Data: Humas Polres Kota Pagaralam, 2017

1. Sumber: Dokumen Arsip Staf Humas Polres Pagaralam [↑](#footnote-ref-1)
2. Sumber: Dokumen *Arsif Staf Humas Polres Pagaralam,* di ambil pada tanggal 20 Okteber 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
7. Humas.polri.*go.id* [↑](#footnote-ref-7)
8. Humas.Pemerintah kota Pagaralam*.go.id* [↑](#footnote-ref-8)
9. *ibid* [↑](#footnote-ref-9)
10. *ibid*  [↑](#footnote-ref-10)
11. *Humas Pemerintah Kota Pagaralam, 2017* [↑](#footnote-ref-11)
12. *ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. *ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. *ibid* [↑](#footnote-ref-14)